

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2008
PAMATANG RAYA**

SKRIPSI

Oleh :

K.M.SYAH DAN

NIM : 06 833 0060



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/2/24

Judul : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam
Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Simalungun Tahun 2008 Pamatang Raya

Nama : K.M.Syahdan

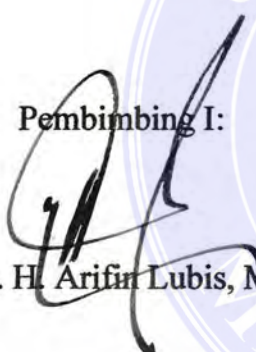
No. Stambuk : 06.833.0060

Jurusan : Akuntansi



Menyetujui
Komisi Pembimbing :

Pembimbing I:


Drs. H. Arifin Lubis, MM

Pembimbing II:


Linda Lores, SE, Msi

Mengetahui:

Ketua Jurusan:


Linda Lores, SE, Msi



Dekan:


Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M. Ec

UNIVERSITAS MEDAN AREA Tanggal Lulus : 9 April 2010

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/2/24

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah laporan keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah tepat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *deskriptif* sedangkan sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Proses penyajian laporan keuangan pemerintahan, penyusunan laporan keuangan pemerintah dan komponen – komponen laporan keuangan PEMKAB SIMALUNGUN menurut penulis sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tahap penyusunan laporan keuangan PEMKAB SIMALUNGUN ditujukan kepada Gubernur, BPK, DPRD se Indonesia yang ditetapkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan pasal 194 UU N0.32/2004. Komponen Laporan Keuangan PEMKAB SIMALUNGUN yang dianalisis dan dievaluasi dalam skripsi ini adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, PEMKAB SIMALUNGUN.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan	4
B. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan	7
C. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan	9
D. Komponen Laporan Keuangan Pemerintahan	10

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	18
B. Definisi Operasional	19
C. Jenis dan Sumber Data.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data	20

E. Teknik Analisis Data	21
-------------------------------	----



BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

a. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi

PEMKAB SIMALUNGUN..... 22

b. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan

PEMKAB SIMALUNGUN..... 30

c. Komponen Laporan Keuangan

PEMKAB SIMALUNGUN..... 31

B. Pembahasan

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam

Penyajian Laporan keuangan PEMKAB SIMALUNGUN .. 60

b. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

PEMKAB SIMALUNGUN 61

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah merupakan laporan informasi tentang suatu perusahaan dibidang keuangan dalam bentuk angka-angka beserta penjelasannya, dan sekaligus laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan diantaranya adalah: Manajer atau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan atau pemegang saham, kreditur (investor dan banker) serta pemerintah.

Kebijaksanaan yang telah dilakukan pada masa yang lalu dan sekaligus sebagai pedoman perencanaan dimasa yang akan datang. Bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham, laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui apakah dana yang mereka investasikan pada perusahaan sudah dikelola secara professional, sehingga mereka dapat memperkirakan deviden yang akan diterima. Bagi kreditur, (investor maupun banker), laporan keuangan diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi kewajiban-kewajibannya dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Bagi pemerintah laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui dan menetapkan berapa besar pajak yang harus dibayar kepada negara.

Agar laporan keuangan dapat memenuhi kepentingan semua pihak diperlukan suatu standard akuntansi yang mendasari laporan keuangan tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan yang telah disusun oleh suatu

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

komite standard yang independen dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang diharapkan dapat memenuhi bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Memahami begitu pentingnya laporan keuangan yang berdasarkan standard akuntansi pemerintahan maka penulis ingin mendalami bidang ini, sehingga objek yang menjadi penelitian adalah suatu badan pemerintahan daerah yaitu PEMKAB SIMALUNGUN (Pemerintah Kabupaten Simalungun) dikarenakan akan ditetapkannya rencana penyusunan laporan keuangan pemerintahan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada tahun 2008.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyajian Laporan Keuangan PEMKAB SIMALUNGUN Tahun 2008”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : “Apakah laporan keuangan PEMKAB SIMALUNGUN sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan PEMKAB SIMALUNGUN sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sedapat mungkin menarik kesimpulan untuk memberikan saran yang mungkin berguna bagi PEMKAB SIMALUNGUN sehubungan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan yang diterapkan pada tahun 2008.
2. Menjadi satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak ekstern maupun intern PEMKAB SIMALUNGUN yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis khususnya mengenai laporan keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang baru berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Perkembangan akuntansi pemerintahan secara umum diseluruh negara juga sudah berkembang meskipun tidak sepesat perkembangan akuntansi bisnis. Didalam sejarah akuntansi, akuntansi pemerintah lebih dahulu muncul sebelum adanya akuntansi bisnis. Adanya tulis-menulis dan angka didalam peradaban manusia, serta adanya sistem bilangan desimal di Arab semakin mempercepat akuntansi pemerintahan tumbuh didalam rangka administrasi keuangan penguasa di beberapa negara saat itu.

Akan tetapi, dunia bisnis yang semakin berkembang dengan berbagai jenis transaksi yang muncul, menuntut akuntansi bisnis berkembang. Standar akuntansi dan berbagai perlakuan akuntansi didunia bisnis harus dibuat dalam rangka pemenuhan akuntabilitas keuangan yang baik.

Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (user) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktifitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklafikasian dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.



Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar (2002 : 3), mendefinisikan akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan pengklafikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penfsiran atas informasi keuangan tersebut.

Dengan demikian secara umum pengertian tersebut tidak berbeda dengan akuntansi, dan perbedaan terletak pada jenis transaksi yang dicatat dan penggunaannya. Jenis yang dicatat didalam akuntansi pemerintahan adalah transaksi keuangan pemerintahan yang sebagian akan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakanya dengan transaksi dalam akuntansi bisnis. Pengguna informasi keuangan pemerintahan antara lain rakyat secara umum yang diwakili oleh lembaga legislatif, pemerintah sendiri, kreditor seperti Bank Dunia, Internasional Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB) dan lainnya.

Abdul Halim (2002 : 31), Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintahan.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Ketiga tujuan diatas akan lebih mampu dipenuhi oleh akuntansi daripada oleh tata buku, karena :

1. Akuntansi menghasilkan lebih banyak informasi dibandingkan tata buku, misalnya dihasilkannya neraca, laporan surplus/defisit anggaran, laporan perubahan ekuitas dana dan laporan arus kas. Hal ini menyebabkan tujuan pertanggungjawaban makin terpenuhi melalui laporan surplus/defisit anggaran.
2. Akuntansi menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi yang lebih baik dibandingkan tata buku, sehingga dari segi pengawasan intern (oleh pihak Pemerintahan Daerah sendiri) dan ekstern (oleh BPKP, rakyat, Pemerintah Pusat, DPRD, analisis keuangan, investor, kreditor, Donatur dan lain-lain), informasi yang dihasilkan oleh akuntansi lebih akuntabel dan transparan sesuai dengan jiwa PP.No.105/2000.

Suatu standar dalam akuntansi adalah suatu metode atau pendekatan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA menyusun laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi, profesi akuntansi

akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, sehingga lebih berdaya guna, dapat dimengerti, dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan.

Nordiawan, dkk (2007 : 137), Standar Akuntansi Pemerintah selanjutnya disebut SAP. “SAP merupakan acuan praktik akuntansi bagi pemerintah di Indonesia. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP yang ditetapkan dalam PP No.24 Tahun 2005, mempunyai kerangka konseptual dan beberapa pernyataan yang seluruhnya harus dipahami secara komprehensif”. Sistem akuntansi pemerintah sebagai salah satu perangkat terciptanya akuntabilitas dan merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

B. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan

Dengan meninjau tujuan laporan keuangan pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan maka telah tampak jelaslah pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan mengatur prinsip-prinsip akuntansi di dalam penyajian Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBN/APBD di wilayah Tingkat I. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah telah dibahas pada bagian Pendahuluan. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA merupakan garis pedoman atau acuan yang memberi tolak ukur atau peraturan

untuk ditetapkannya sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah. Sehingga dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang disajikan akan menjadi lebih berkualitas, lebih berguna, dapat dimengerti, dapat dibandingkan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah tanpa menggunakan suatu acuan akan mengakibatkan laporan keuangan itu kehilangan tujuannya. Karena disusun sesuai selera dan kepentingan penyusunnya. Tidak akan terwujud keseragaman dalam penerapannya dan tidak pula dapat diukur dengan suatu parameter yang netral, sehingga laporan keuangan tidak dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya dalam pembuatan keputusan.

Pemakai laporan keuangan membutuhkan informasi yang tepat. Untuk itu disusun serangkaian laporan keuangan yang bertujuan umum yang diharapkan dapat menyajikan secara jelas, tepat dan lengkap. Dalam menyiapkan laporan keuangan, akuntan dihadapkan pada masalah salah interpretasi, ketidak tepatan data yang disajikan dan lainnya yang kesemuanya itu dapat membahayakan.

Untuk meminimumkan kemungkinan di atas, maka dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi barometer didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pentingnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Prinsip Good Governance yaitu

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, terletak pada peran dan tujuan laporan keuangan.

C. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan mekanisme prosedural yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Dalam sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran), contoh inputnya adalah bukti memorial, surat tanda setoran dan surat perintah membayar, kemudian prosesnya menggunakan catatan yang meliputi buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar dan buku besar pembantu. output sistem akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Abdul Halim (2004 : 43), Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal, tahap ini disebut menjurnal.
3. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahap ini disebut posting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar diakhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo.
5. menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling up-to-date (mutakhir).
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.

D. Komponen Laporan Keuangan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No.24 (2005 : kk-8), “Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan sebagai kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran membuat anggaran dan realisasi.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcoms dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Disamping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

ad.a. Laporan Realisasi Anggaran

Bastian (2006 : 387), “ Laporan realisasi anggaran adalah laporan ang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi dalam APBD diakhir periode”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, ang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan

Peraturan Pemerintah No.24 (2005 : kk-16), “ Unsur yang dicakup secara langsung Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

1. **Pendapatan (basis kas)** adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintahan lainnya

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimasukkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- g. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari pinjaman dan investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah”.

ad.b.Neraca

Syafri (2008 : 205), “Neraca atau disebut juga posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau moment of time, sering disebut juga per tanggal tertentu misalnya per tanggal 31 Desember 2005”.

Bastian (2006 : 247), “Neraca adalah laporan posisi keuangan, atau disebut dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu”.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah uang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah”.

ad.1.Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi yang permanen antara lain investasi dalam surat utang negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi non permanen antara lain investasi dalam surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

ad.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

ad.3. Ekuitas Dana

ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewaj jangka panjang.
- c. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai aturan perundang-undangan.

ad.c. Laporan arus kas

Abdul Halim (2004 : 90) “Laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas termasuk setara kas pada tanggal pelaporan”.

Klasifikasi arus kas menurut aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi

kas dan setara kas pemerintahan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk

mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang dan diklasifikasikan kedalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi.

Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum Negara/daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum Negara/daerah.

ad.d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan.

3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.
5. Mengungkapkan informasi tentang pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penetapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan pendapatan basis kas, dan
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2008 : 11) “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PEMKAB SIMALUNGUN Pamatang Raya Siantar. Telp (0622) 331280.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2009 – bulan Februari 2010. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2009 - 2010				
		Des'09	Jan'09	Feb'10	Mar'10	Apr'10
1.	Pencarian Judul					
2.	Pengajuan judul					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Pengumpulan Data					
6.	Pengolahan dan Analisis Data					
7.	Bimbingan Skripsi					
8.	Penyusunan Skripsi					
9.	Sidang Meja Hijau					

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan dibahas untuk memudahkan pemahaman dalam suatu penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan pemerintahan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan dalam satu periode pelaporan.
- b. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan praktik akuntansi bagi pemerintah di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD diawal periode dengan jumlah yang telah direalisasi dalam APBD diakhir periode.
- d. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, modal pemilik pada satu saat tertentu.
- e. Laporan Arus Kas adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan.
- f. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

C. Jenis dan Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2002:145) menyatakan bahwa jenis data penelitian dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Data subyek
2. Data fisik
3. Data dokumenter

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data subyek dan data dokumenter. Data subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden (subyek penelitian) secara individual atau secara kelompok. Sedangkan data dokumenter berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari data primer. Data primer adalah data yang didapat dari PEMKAB SIMALUNGUN melalui survei.

D. Teknik Pengumpulan Data

Indriantoro dan Supomo (2002:152) menyatakan bahwa untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

1. Teknik wawancara yaitu melakukan tanya jawab dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di PEMKAB SIMALUNGUN.
2. Teknik Dokumentasi adalah Peneliti meminta langsung data mengenai laporan keuangan tahun 2008 kepada KABAG keuangan PEMKAB SIMALUNGUN.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif, Sugiono (2008 : 206), “Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” Dalam penelitian ini menyajikan data dengan menggunakan tabel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

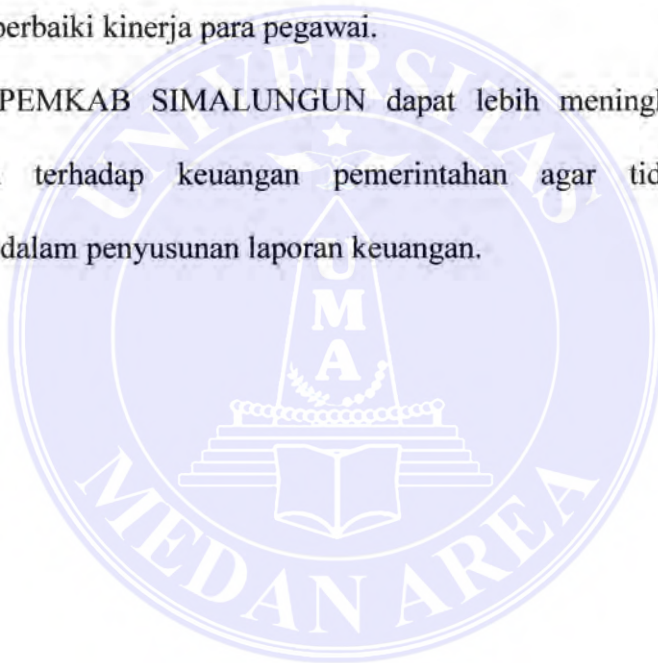
Dari hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa proses penyajian laporan keuangan pemerintahan, penyusunan laporan keuangan pemerintah dan komponen – komponen laporan keuangan PEMKAB SIMALUNGUN menurut penulis sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintahan, PEMKAB SIMALUNGUN menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum di Indonesia.
2. Tahap penyusunan laporan keuangan PEMKAB SIMALUNGUN ditujukan kepada Gubernur, BPK, DPRD se Indonesia yang ditetapkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan pasal 194 UU N0.32/2004.
3. Komponen Laporan Keuangan PEMKAB SIMALUNGUN yang dianalisis dan dievaluasi dalam skripsi ini adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

B. SARAN

Setelah membuat beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan, berikut ini penulis mencoba untuk memberikan saran berupa masukan kepada PEMKAB SIMALUNGUN yang mungkin dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan untuk masa-masa yang akan datang.

1. PEMKAB SIMALUNGUN harus melakukan tindakan korektif yang tepat untuk memperbaiki kinerja para pegawai.
2. Sebaiknya PEMKAB SIMALUNGUN dapat lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap keuangan pemerintahan agar tidak terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Revisi, Jilid I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi 3, Penerbit Salemba 4, Jakarta 2004.
- Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik**, Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta 2006.
- Indra Bastian, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2006.
- Bachtiar Arif dkk, **Akuntansi Pemerintahan**, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Deddi Nordiawan dkk, **Metode Penelitian**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Alfabeta, Jakarta 2008.
- Sofyan Syafri Harahap, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, Penerbit Rajawali pers, Jakarta, 2008.
- Indriantoro dkk, **Metode Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi Pertama, yogy, 2002.
- Retnawati Srg dkk, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area, Medan, 2008.
- PP. No.24 Tahun 2005 Tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- Pemerintah Kabupaten Simalungun Tentang **Laporan Keuangan tahun 2008**.